

DATA PIRANTI LUNAK SAT RESNARKOBA TAHUN 2017

NO	JENIS	NOMOR/TAHUN	TENTANG	JUMLAH	KET
1	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 14 TAHUN 2012	MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	1	
2	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 22 TAHUN 2011	ADM PERWABKEU DI LINGKUNGAN POLRI	1	
3	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 2 TAHUN 2002	TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
4	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 3 TAHUN 2008	PEMBENTUKAN RUANG PELAYANAN KHUSUS DAN TATA CARA PEMERIKSAAN SAKSI DAN ATAU KORBAN TINDAK PIDANA	1	
5	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 3 TAHUN 2016	ADMINISTRASI KEPANGKATAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
6	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 4 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS PERKAP NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ADMINISTRASI PERWABKEU DI LINGKUNGAN POLRI	1	
7	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 5 TAHUN 2010	TATA CARA PENYADAPAN PADA PUSAT PEMANTAUAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
8	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 8 TAHUN 2009	IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
9	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 8 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	

10	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 10 TAHUN 2010	TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
11	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 12 TAHUN 2012	PENYELENGGARAAN ASSESMENT CENTER DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
12	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 12 TAHUN 2009	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
13	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 14 TAHUN 2011	KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INONESIA	1	
14	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 15 TAHUN 2010	PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
15	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 15 TAHUN 2006	KODE ETIK PROFESI PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
16	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 16 TAHUN 2010	TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
17	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 21 TAHUN 2011	SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN	1	
18	PERKAP KAPOLRI	NOMOR 23 TAHUN 2010	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESORT DAN KEPOLISIAN SEKTOR	1	
19	KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	-	-	1	
20	UNDANG-UNDANG	NOMOR 35 TAHUN 2009	NARKOTIKA	1	
21	UNDANG-UNDANG	NOMOR 5 TAHUN 1997	PSIKOTROPIKA		
22	UNDANG-UNDANG	NOMOR 36 TAHUN 2009	KESEHATAN	1	
23	UNDANG-UNDANG	NOMOR 8 TAHUN 1981	KUHAP	1	
24	UNDANG-UNDANG	NOMOR 8 TAHUN 2010	PENCUCIAN UANG	1	

25	UNDANG-UNDANG	NOMOR 11 TAHUN 2008	ITE	1	
26	UNDANG-UNDANG	NOMOR 11 TAHUN 2012	SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	1	
27	UNDANG-UNDANG	NOMOR 13 TAHUN 2006	PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	1	
28	UNDANG-UNDANG	NOMOR 26 TAHUN 2000	HAM	1	
29	UNDANG-UNDANG	NOMOR 39 TAHUN 1999	PENYELENGGARAAN PUSAT INFORMASI KRIMINAL NASIONAL DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1	
30	UNDANG-UNDANG	NOMOR 16 TAHUN 2011	BANTUA HUKUM	1	
31	UNDANG-UNDANG	NOMOR 18 TAHUN 2012	PANGAN		
32	PERKABA	NOMOR 1 TAHUN 2014	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA		
33	PERKABA	NOMOR 2 TAHUN 2014	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGORGANISASIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	1	
34	PERKABA	NOMOR 4 TAHUN 2011	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	1	
35	PERDA	NOMOR 4 TAHUN 1997	LARANGAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN, PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	1	
36	PERMA		PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI	1	
37	PERMA	NOMOR 4 TAHUN 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	1	
38	PEDOMAN		PELAPORAN BARANG BUKTI YANG BERNILAI EKONOMIS YANG DISITA OLEH PENYIDIK	1	

39	KEPMENKES	NOMOR 522/MENKES/SK/VI /2008	PENUNJUKAN LABOLATORIUM PEMERIKSAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA	1	
40	KEPRES	NOMOR 3 TAHUN 1997	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL	1	
41	PERDA	NOMOR 2 TAHUN 2015	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL	1	
42	PERMENDAG	NOMOR 06/M- DAG/PER/1/2015	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTRI PERDAGANGAN NOMOR : 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	1	
43	PERMENDAGRI	NOMOR 20/M- DAG/PER/4/2014	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL	1	
44	PERMENKES	NOMOR 46 TAHUN 2012	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS BAGI PARA PECANDU, PENYALAHGUNA, DAN KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA YANG DALAM PROSES ATAU YANG TELAH DIPUTUS OLEH PENGADILAN	1	
45	PP	NOMOR 40 TAHUN 2013	PELAKSANAAN UU NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	1	
46	JUKRAH	NOMOR ST/859/VIII/2015	GELAR KHUSUS	1	
47	JUKRAH	NOMOR ST/716/III/2016	TROBOSAN KREATIF PENYIDIK	1	
48	JUKRAH	NOMOR ST/856/VIII/2015	KETENTUAN PAKAIAN RESKRIM	1	
49	JUKRAH	NOMOR ST/1039/IX/2015	KETENTUAN PENGAJUAN ANGGARAN LIDIK DAN SIDIK	1	
50	JUKRAH	NOMOR ST/953/VIII/2015	BANTUAN HUKUM DALAM PENYIDIKAN WARGA MISKIN	1	

52	JUKRAH	NOMOR ST/1055/IX/2015	KETENTUAN PEMERIKSAAN ANGGOTA DEWAN	1	
53	STR	NOMOR ST/1088/IIIX/2015	TINGKAT PENANGANAN KASUS	1	
54	HIMPUNAN PERKAP	-	BIDANG OPERASIONAL	1	
55	SOP BARESKRIM	-	SUPERVISI	1	

Gerung, Oktober 2017
KEPALA SATUAN RESERSE NARKOBA



PRIYO SUHARTONO, S.I.K
AKP NRP 86091921